

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi Pada Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia)**

Anggraeni, Samiruddin T, Irawaty

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Halu Oleo

Email: anggraenhyenhy699@gmail.com, samiruddin@gmail.com,
irawatyfkip67@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tahap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam (*indepth interviews*), dokumentasi. Responden pada penelitian ini berjumlah 16 orang masyarakat di Kelurahan Anggoeya dan 3 orang informan yaitu, anggota KPU, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia sangat rendah ini tergambarkan dari aktivitas mereka mengikuti tahapan pemilihan calon presiden dan wakil presiden yakni tahap Sosialisasi, tahap Kampanye, tahap Pemilihan di TPS, tahap perhitungan suara di TPS. Simpulan penelitian yaitu Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil presiden Tahun 2019 di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia sangat rendah, indikasi rendahnya partisipasi ini ditunjukkan oleh rendahnya keikutsertaan mereka dalam kegiatan sosialisasi, kegiatan kampanye, tahap pemilihan di TPS, tahap perhitungan suara di TPS, kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar tidak diikuti oleh masyarakat di Kelurahan Anggoeya.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses proses politik.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing.

Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak

politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Konsep Demokrasi

Kata “Demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme system pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.

Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*. Artinya, pola pemerintahan yang berasal dari rakyat. Bisa juga pemerintah (Presiden) dipilih oleh para wakil rakyat. Maknanya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. (Jailani, 2015: 136-138).

Konsep Partisipasi

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga Negara dalam proses politik. Keikutsertaan warga Negara dalam politik tidak hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinannya, melainkan juga ikut memilih dalam penentuan pimpinannya (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum) dan masih banyak lagi. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia menerangkan bahwa partisipasi adalah ikut serta dalam suatu kegiatan, kegiatan itu bisa bersifat formal maupun informal.

Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi yang dilakukan warga Negara tidak hanya pada tahapan implementasi/pelaksanaan, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan/formulasi kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat simobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain. (Sholihin, dkk 2014: 496-497)

Partisipasi Politik

Menurut Herbert Mc Closky (Budiardjo, 2017: 367) bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*the term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (Budiardjo, 2017: 368) bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh

pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Ranjabar (2016: 234) partisipasi politik sebagai kegiatan, dapat dibedakan menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Yang termasuk kedalam partisipasi politik aktif diantaranya adalah kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan yang umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk partisipasi politik pasif dapat berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output politik.

Berdasarkan pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Tahapan-tahapan Pilkada ada dua, tahapan yang dimaksud meliputi:

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan dalam pilkada meliputi: a) Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir; b) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan ini juga dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah tersebut berakhir; c) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal pelaksanaan Pilkada. (1) Perencanaan ini diputuskan dengan ketetapan KPUD paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan DPRD. (2) Ketetapan tentang perencanaan tersebut disampaikan KPUD kepada DPRD dan Kepala Daerah; d) Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS; dan e) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pilkada meliputi: a) penetapan daftar pemilih, b) pendaftaran dan penetapan pasangan calon, c) kampanye, d) pemungutan suara, e) penghitungan suara, f) penetapan calon kepala/wakil kepala daerah terpilih, termasuk pengesahan dan pelantikan.

a) Penetapan Daftar Pemilih

Proses penetapan daftar pemilih Pilkada meliputi:

1) Penyusunan penetapan daftar pemilih Pilkada meliputi:

- a. Daftar pemilih sementara diproses dari daftar pemilih pelaksanaan Pemilu terakhir di daerah disertai daftar pemilih tambahan.
- b. Bila ada usulan-usulan daftar pemilih sementara masih bisa diperbaiki (misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat, identitas, dan lain – lain).

2) Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap:

- a. Daftar pemilih sementara akan diusul menjadi daftar pemilih tetap.
- b. Daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebutuhan suara dan berbagai perlengkapan pemilihan.
- c. Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS desa/RT/RW/atau tempat lain yang strategis

3) Pembagian Kartu Pemilih

- a. Sesudah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar pemilih tetap.
- b. Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh PPS dibantu oleh RT/RW
- c. Kartu pemilih digunakan pemilih untuk memberikan suara
- d. Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan PPS tidak dapat diubah lagi.
- b) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon
Yang mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah adalah partai politik, atau gabungan partai politik.
- c) Kampanye Pilkada
Kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara
- d) Pemungutan Suara
Penyelenggaraan pemungutan suarapemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.
- e) Penghitungan Suara
Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS sesudah pemungutan suara berakhir.
- f) Penetapan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah
Pasangan calon kepala/wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 50% suara merupakan calon pasangan kepala/wakil kepala Daerah terpilih.
Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 3 ayat (1) sampai (7) yang berbunyi:
- 1) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- 3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- 4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
- 5) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 6) Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden meliputi:
 1. Penyusunan daftar pemilih;
 2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
 3. penetapan pasangan calon;
 4. masa kampanye;
 5. masa tenang;
 6. pemungutan dan penghitungan suara;
 7. penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden; dan
 8. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden.
- 7) Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Konsep Pemilihan Umum

Menurut Ali Moertopo (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 6) Pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai

dengan asas yang bermakna dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Jamaludin Aziz, 2013: 9).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia, pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat di Kelurahan Anggoeya masih cukup rendah sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di lokasi tersebut.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti bagaimanakah tahapan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui masyarakat, dan anggota KPU. Subyek penelitian ini terdiri dari informan dan responden dengan rincian informan berjumlah 3 orang terdiri dari anggota KPU, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta responden berjumlah 16 orang yang terdiri dari masyarakat. Untuk memperoleh informasi mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan wakil presiden Tahun 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*indepth interviews*)

Wawancara mendalam (*indepth interviews*) merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan keluwesan, keterampilan, kemampuan dan pengetahuan tertentu dari peneliti untuk melakukan wawancara, baik dengan responden maupun informan. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat, ketua

KPU dan anggota KPU untuk mengumpulkan data mengenai partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Presiden tahun 2019.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dijadikan informasi berbentuk tulisan atau arsip, gambar. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *form dokumentasi*.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Karsadi, 2018: 83) ada tiga kegiatan/ aktifitas atau komponen yang dilakukan peneliti setelah pengumpulan data, yakni data *Reduction* (reduksi data) data *display* (penyajian data), dan *conlutions draiwing/verifying* (penarikan kesimpulan).

- a) Data *Reductions* (reduksi data) dimaksudkan untuk mereduksi data yang jumlahnya banyak yang sifatnya masih kasar, mentah, dan berserakan dari data yang dikumpulkan di lapangan menjadi terorganisir dan tersistematisasi, terseleksi, terseleksi mana yang perlu digunakan (dibuang), terseleksi data mana yang relevan dan utama dan mana yang hanya sebagai penunjang, sehingga datanya menjadi fokus dan terarah.
- b) Data *displey* (penyajian data) di maksudkan agar data yang terorganisir, tersistematisasi, sederhana, fokus dan terarah, kemudian ditampilkan dan disajikan dalam bentuk negatif yang memiliki arti, sehingga mudah di pahami dan dimengerti. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan datan yang sudah fokus yang terarah untuk mendeskripsikan temuan di lapangan, baik melalui wawancara, dokumentasi maupun catatan lapangan lainnya.
- c) *conlutions draiwing/verifying* (penarikan kesimpulan/verifikasi) dimaksudkan agar setelah reduksi data atau penyajian data (tidak harus diharuskan keduanya) maka langkah selanjutnya dilakuka verifikasi secara tepat, cermat, dan teliti oleh peneliti, maka baru disusun kesimpulan yang masi sementara dan dilakuan verifikasi secara berkesinambungan, sehinnng pada akhirnya disusun kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ditunjukan untuk menjawab masalah yang menjadi fokus peneltian (masalah penelitian).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam hal ini adalah kegiatan atau aktivitas politik masyarakat di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia seperti mengikuti kampanye calon presiden dan wakil presiden, mengikuti sosialisasi yang di adakan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengikuti setiap debat yang di adakan oleh KPU, serta ikut memilih di TPS dan menyaksikan perhitungan suara calon presiden dan wakil presiden, kegiatan-kegiatan tersebut adalah bentuk partisipasi secara aktif masyarakat. Kegiatan politik tersebut memiliki banyak tahapan-tahapan antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Sosialisasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Ikut dalam kegiatan politik adalah salah satu bentuk partisipasi, yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan demokrasi karena pada dasarnya demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat oleh sebab itu keikut sertaan

masyarakat dalam kegiatan politik seperti sosialisasi yang di adakan oleh salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden sangat penting karena hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang sangat diperlukan dalam keberlangsungan demokrasi.

2. Tahap Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Tahap kampanye merupakan salah satu bentuk partisipasi politik, yang merupakan kewajiban semua Warga Negara namun hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi karena dari hasil wawancara dengan responden, peneliti menemukan bahwa rata-rata masyarakat di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia jarang mengikuti tahap kampanye, hal ini di sebabkan oleh kesibukan masing-masing masyarakat yang berada di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia.

3. Tahap Pemungutan Suara kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Tahun 2019

Tahap pemilihan di TPS adalah hal yang tidak asing bagi masyarakat karena pada tahap pemilihan umum di TPS adalah hal yang rutin yang dilakukan masyarakat pada pemilihan calon pemimpin, hal ini karena para masyarakat yang ada di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia diberikan surat panggilan meskipun tidak merata tetapi mereka tetap pergi ke TPS untuk memilih meskipun menggunakan KTP, namun partisipasi masyarakat di Kelurahan Anggoeya masih rendah di karenakan masih ada masyarakat yang memilih untuk GOLPUT dari pada memberikan hak pilih mereka kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Yang Memilih	Jumlah yang Tidak Memilih
1.	Laki-Laki	1.990	1.483	507
2.	Perempuan	2.000	1.632	368
	Jumlah	3.990	3.115	875

Sumber: data KPU Kota Kendari, 2019

4. Tahap Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pada tahap perhitungan suara di Tempat pemungutan suara pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 di TPS adalah mengikuti pelaksanaan perhitungan suara hingga selesai namun, pada kasus yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia mereka kurang berpartisipasi pada saat perhitungan suara

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia masih sangat kurang, hal ini dikarenakan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik seperti sosialisasi, kampanye, pemungutan suara di TPS, sampai pada tahap atau proses perhitungan suara di TPS, banyak masyarakat yang tidak mengikuti atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti mengajukan saran yakni Sebaiknya pemerintah mengadakan penyuluhan untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya partisipasi politik dalam masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan politik baik itu partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, kegiatan kampanye, mengikuti debat yang diadakan oleh KPU, kegiatan pemungutan suara yang dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) sampai dengan kegiatan atau proses perhitungan suara di tempat perhitungan suara (TPS) sehingga masyarakat bisa memahami bahwa partisipasi dalam politik itu sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Jamaludin. 2013. *Peran KPU Mengatasi Angka Golput Serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Cimahi*. Repository. UPI. Edu/40761/1 S_PKN_0906506_TITLE. Pdf
- Budiardjo, Miriam. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika
- Jailani. 2015. *Sistem Demokrasi di Indonesia di tinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*. <https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/21971536>.
- Fajlurrahman, Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana
- Karsadi. 2018. *Metodologi Penelitian Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ranjabar, Jacobus. 2016. *Pengantar Ilmu Politik dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sholihin Rio, Nur Fitriyah, Stadi M. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur*. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/536/488>
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.